

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa adanya hubungan kerja sama antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. *Agent* berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh *principal* kepadanya. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di Pemerintahan antara rakyat sebagai *agent* dan pemerintah sebagai *principal*. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan *monitoring* oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh *agent*. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban *agent* kepada *principal* atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semakin menguatnya tuntutan terhadap lembaga-lembaga publik untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

## 2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Pelaporan keuangan juga membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi. Oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat dan daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu, pemerintah pusat juga menerbitkan beberapa peraturan pemerintah (PP) menyangkut pengelolaan keuangan daerah diantaranya, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam standar akuntansi pemerintahan terdapat empat persyaratan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu; Relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan sangat menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD, tiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atastransaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya. Pencatatan dalam proses akuntansi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan perubahan sisa anggaran (SAL), Neraca, Laporan operasi (LO), Laporan perubahan ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan

keuangan dari tiap-tiap SKPD tersebut dikonsolidasikan oleh DPPKAD menjadi Laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD).

### **2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014). Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang berada didalamnya. Dalam organisasi publik, peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi sumber daya manusia pada setiap level manajemen menjadi *urgen* baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Kompetensi menurut (Spencer and Spencer, 1993) adalah suatu karakteristik yang mendasari kepribadian seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keperilakuan efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk katagori baik/rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesti perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM. Kompetensi terdiri dari lima karakteristik, yaitu: *Knowledge*, *Skills*, *Motives*, *Traits* (sifat), *Self Concept* (konsep diri). Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilanya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamanya bisa meminimalisir kesalahan. Tiga kecenderungan ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan pasal 3 PP No.101 Tahun 2000 bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki

oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Menurut Zuliarti (2012), kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

#### **2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau *fraud* (Afriyanti, 2011).

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

##### **1. Pengendalian Umum**

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

## 2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan, dan memelihara sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

### **2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut (Bastian, 2005; Kusumah, 2012), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penerapan standar akuntansi pemerintah akan mengarahkan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang lebih baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai informasi yang lebih baik (Putra, 2015).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintah adalah standar akuntansi pemerintahan yang di dalamnya mencakup unsur kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, prosedur pencatatan akuntansi dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dan pembuatan laporan keuangan yang disajikan secara periodik.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

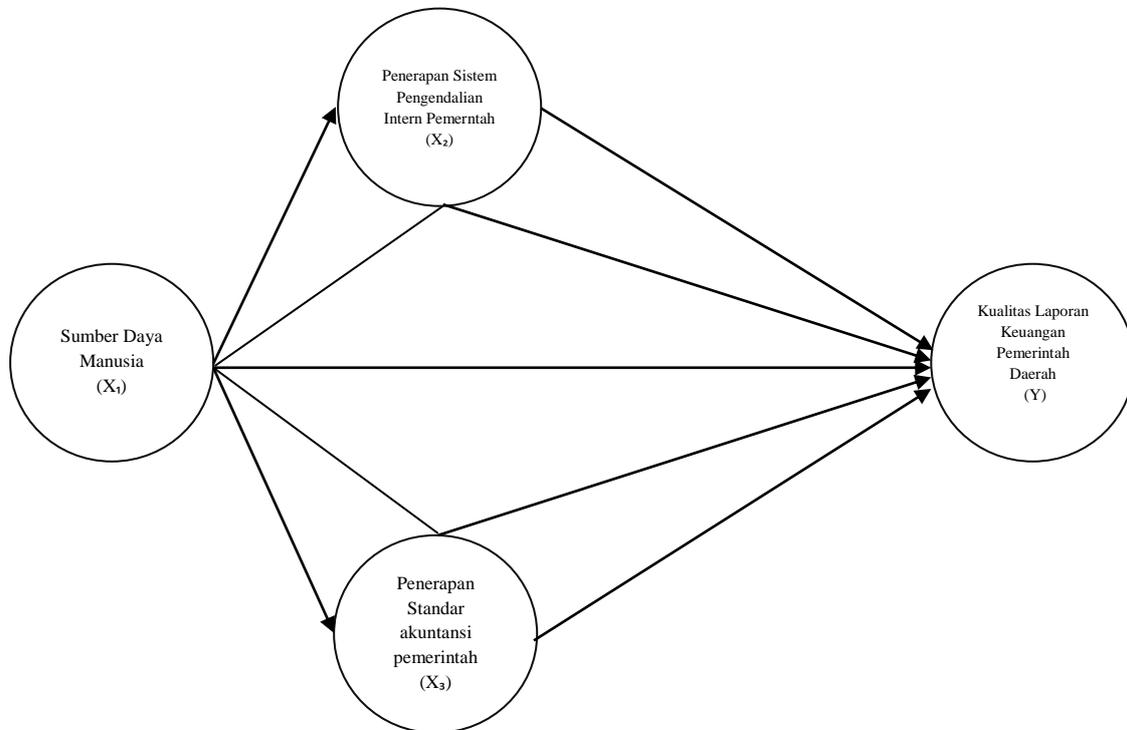
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	As Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPD	Kompetensi SDM ( $X_1$ ), Penerapan SAKD ( $X_2$ ), Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ), Penerapan SPIP ( $X_4$ ) dan Kualitas LKPD (Y)	Kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD.
2	Bayu Dharma Putra. Syamsul Amar (2015)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SPIP, dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang	Kompetensi SDM ( $X_1$ ), Penerapan SPIP ( $X_2$ ), Penerapan SAP ( $X_3$ ) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan SPIP, Kompetensi SDM dan SPIP berpengaruh terhadap Penerapan SAP, Kompetensi SDM, SPIP dan SAP berpengaruh terhadap Kualitas LKPD.
3	Kadek	Pengaruh	Kompetensi SDM	Kompetensi SDM,

	Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	(X <sub>1</sub> ), Penerapan SAP (X <sub>2</sub> ), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X <sub>3</sub> ) dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Penerapan SAP dan SAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4	Ni Made Sudiaranti, I Gusti Ketut Agung Ulupui, dan I G.A. Budiasih (2015)	Pengaruh Kompetensi SDM pada Penerapan SPIP dan SAP Serta Implikasinya pada Kualitas LKPD	Kompetensi SDM (X <sub>1</sub> ), Penerapan SPIP (X <sub>2</sub> ), Penerapan SAP (X <sub>3</sub> ) dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Y)	Kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SPIP, SAP dan kualitas LKPD. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki PPK-SKPD maka penerapan SPIP, SAP dan kualitas LKPD yang dihasilkan PPK-SKPD cenderung semakin baik.
5	Ulfa Rima Nugraheta (2017)	Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD	Kompetensi SDM (X <sub>1</sub> ), Penerapan SPIP (X <sub>2</sub> ), Penerapan SAP (X <sub>3</sub> ) dan Kualitas LKPD (Y)	Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Sedangkan Penerapan SPIP dan SAP berpengaruh terhadap kualitas LKPD.

## 2.7 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

## 2.8 Bangunan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi pengetahuan, keahlian dan sikap akan meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pencapaian sasaran organisasi (Sari, 2012). Sasaran organisasi yang optimal dapat dicapai melalui pengendalian yang dilaksanakan oleh sumber daya yang memiliki kompetensi secara efektif dan efisien. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan menguasai PP No. 60 tahun 2008 dengan baik (Indriasih, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2015) menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah karena yang menjalankan sistem pengendalian intern

pemerintah tersebut adalah manusia. Jika dalam melaksanakan tugasnya, sumber daya manusia menggunakan keahlian dan pengetahuan dengan baik serta didukung dengan perilaku yang mengutamakan kode etik maka pengendalian intern akan berjalan efektif dimana proses yang tercipta memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penelitian (Sudiarianti, 2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah maka penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang dihasilkan Satuan Kerja Perangkat Daerah cenderung semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

### **2.9.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta memahami masalah penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi standar akuntansi pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia yang lemah dapat mengakibatkan kesalahan dalam memahami dan melaksanakan metode, teknik dan ketentuan baku yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintah, sehingga laporan keuangan yang dibuat juga akan salah (Suhardjo, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudiarianti, 2015) menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan pada penerapan standar akuntansi pemerintah. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka ada kecenderungan semakin baik terciptanya penerapan standar akuntansi pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah

yang baik membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasi, investasi, pengakuan dan penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud, kontrak konstruksi, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian dan pengembangan, perhitungan persediaan dan dana cadangan serta prinsip lainnya. Tanpa adanya kompetensi yang baik, maka penerapan standar akuntansi pemerintah cenderung tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah.

### **2.9.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Menurut (Wati, 2014) jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2017) menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. artinya, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian (Sudiarianti, 2015) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan pada kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah, artinya semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan Satuan Kerja Perangkat Daerah cenderung semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>3</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **2.9.4 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penerapan pengendalian internal keuangan yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan efektifitas kegiatan operasi (Sari, 2012), Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheta, 2017) menemukan hasil bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat dikatakan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena dengan diterapkannya sistem pengendalian intern maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas, dan tidak ada pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan, karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan kurang etis dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian (Sudiarianti, 2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya semakin tinggi penerapan sistem

pengendalian intern pemerintah yang dilaksanakan, maka kecenderungan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.9.5 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Standar akuntansi pemerintah adalah standar akuntansi pemerintah yang di dalamnya mencakup unsur kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, prosedur pencatatan akuntansi dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dan pembuatan laporan keuangan yang disajikan secara periodik. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh (Nugraheta, 2017) menemukan hasil bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya semakin baik pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Penelitian (Sudiarianti, 2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, artinya semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang dilaksanakan, maka kecenderungan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H5: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.9.6 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa standar akuntansi pemerintah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi empat karakteristik yang dipersyaratkan yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami (Indriasih, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Syarifudin, 2014) menemukan hasil bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel mediasi (intervening) signifikan dalam memediasi pengaruh tidak langsung kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya tingkat variasi kompetensi sumber daya manusia dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dapat semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Sudiaranti, 2015) menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia masih memiliki pengaruh langsung pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun terdapat pengaruh tidak langsung dari kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>6</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

### **2.9.7 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah**

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas memerlukan keahlian sumber daya manusia yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang meliputi pengakuan pendapatan, pengakuan belanja,

prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasi, investasi, pengakuan dan penghapusan asset berwujud dan tidak berwujud, kontrak konstruksi, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian dan pengembangan, perhitungan persediaan, serta perhitungan dana cadangan (Irwan, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudiarianti, 2015) menemukan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memediasi parsial hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menjadi pemediasi hubungan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>7</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah.